



**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENYIMPAN DANA DALAM BADAN HUKUM KOPERASI ILEGAL DI
DINDONESIA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
K/Pdt.Sus-Pailit/2019”**

TESIS

MUAMMAR ADIL DAFFA

1910622056

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2022



**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENYIMPAN DANA DALAM BADAN HUKUM KOPERASI ILEGAL DI
DINDONESIA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3
K/Pdt.Sus-Pailit/2019”**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
Guna mencapai gelar magister hukum**

MUAMMAR ADIL DAFFA

1910622056

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

2022

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muammar Adil Daffa

NIM : 1910622056

Tanggal : 05 Januari 2022

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 05 Januari 2022
Yang Menyatakan,



Muammar Adil Daffa

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muammar Adil Daffa
NIM : 1910622056
Program Studi : Hukum Bisnis Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENYIMPAN DANA DALAM BADAN HUKUM KOPERASI ILEGAL DI DINDONESIA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019.

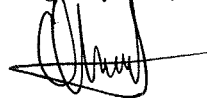
Beserta perangkat yang ada dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Muammar Adil Daffa

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

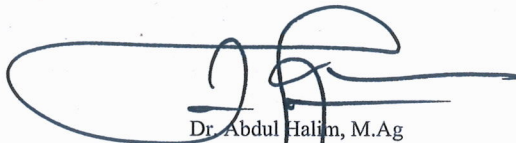
Nama : Muammar Adil Daffa

NIM : 1910622056


Program Studi : Hukum Bisnis Magister Hukum

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
YANG MENYIMPAN DANA DALAM BADAN HUKUM
KOPERASI ILEGAL DI DINDONESIA STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian
persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Ketua Penguji



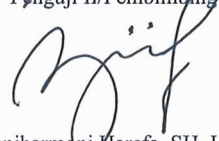
Prof. Dr. Arisman, SH, MH
Penguji I



Dr. Suherman, SH, MH
Penguji II/Pembimbing



Dr. Abdul Halim, M.Ag
Dekan



Dr. Beni Harmoni Harefa, SH, LLM
Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 05 Januari 2022

ABSTRAK

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak boleh bertentangan dengan Pasal 83 UU Pengkoperasian. namun dewasa ini mulai bermunculan koperasi-koperasi yang menyimpang dari ketentuan Pasal 83 dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu contohnya ialah KSP Pandawa Mandiri Grup, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai Koperasi Simpan Pinjam didasari dari Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 260/ SISP/Dep. 1/IV/ 2015 tanggal 7 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Bahwa pada Mulanya, KSP Pandawa Mandiri Grup dalam menjalankan kegiatan usahanya sudah selaras dengan izin yang dimilikinya tersebut, dimana KSP Pandawa Mandiri Grup memberikan fasilitas simpan pinjam pada anggotanya. Namun, dalam proses pengembangan kegiatan usaha tersebut, KSP Pandawa Mandiri Grup membutuhkan modal yang cukup besar, sehingga dapat memberikan plafon pinjaman yang lebih besar kepada para anggotanya. Jalan yang diambil KSP Pandawa Mandiri Grup ialah dengan membukan Sub Usaha baru yang diberinama “Pandawa Grup” sebagai sub kegiatan usaha dibidang penghimpunan dana masyarakat (nasabah yang diluar dari anggota KSP Pandawa Gorup), Dimana dalam hal ini Salman Nuryanto selaku kepala KSP Pandawa Mandiri Grup memberikan janji kepada Nasabah Pandawa Grup berupa *Return Income* berupa bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulannya dari dana yang dihimpun oleh para nasabah. pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan :”Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri. Perlindungan Nasabah yang dapat diberikan oleh negara pada kasus KSP Pandawa Grup ialah Perlindungan Hukum dalam bentuk sarana represif, dimana melalui pengadilan lah hak daripada nasabah tersebut diberikan, dengan begitu nasabah mampu mendapatkan kembali haknya melalui hasil lelang harta yang dimiliki Nuryanto sebagai pemilik dari KSP Pandawa Grup itu sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Koperasi, Nasabah.

ABSTRACT

Cooperatives in carrying out their business activities, may not conflict with Article 83 of the Cooperative Law. however, recently cooperatives have begun to appear that deviate from the provisions of Article 83 in carrying out their business activities. One example is KSP Pandawa Mandiri Group, which in carrying out its business activities as a Savings and Loans Cooperative is based on a Savings and Loans Business License Number: 260/SISP/Dep. 1/IV/2015 dated 7 April 2015 issued by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia. That at first, the KSP Pandawa Mandiri Group in carrying out its business activities was in line with the permit it had, where the KSP Pandawa Mandiri Group provided savings and loan facilities to its members. However, in the process of developing these business activities, KSP Pandawa Mandiri Group requires a sizable amount of capital, so that it can provide a larger loan ceiling to its members. The path taken by the KSP Pandawa Mandiri Group is to open a new sub-business called "Pandawa Group" as a sub-business activity in the field of raising public funds (customers who are not members of the KSP Pandawa Group), where in this case Salman Nuryanto as the head of the KSP Pandawa Mandiri Group provide promises to Pandawa Group customers in the form of Return Income in the form of 10% (ten percent) interest every month from the funds raised by the customers. Article 16 paragraph (1) of Law Number 10 of 1998 concerning Banking which states: "Every party carrying out activities to collect funds from the public in the form of savings must first obtain a business license as a Commercial Bank or Rural Bank from the Management of Bank Indonesia, unless if the activity of collecting funds from the community is regulated by a separate law. The customer protection that can be provided by the state in the KSP Pandawa Group case is legal protection in the form of repressive means, where through the court the rights of the customer are given, so the customer is able to get his rights back through the results of the auction of assets owned by Nuryanto as the owner of the KSP Pandawa Group itself.

Key Words: Legal Protection, Cooperative, Customer

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling mulia diucapkan selain puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jalan yang gelap menuju jalan yang penuh diberkahi oleh Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENYIMPAN DANA DALAM BADAN HUKUM KOPERASI ILEGAL DI DINDONESIA STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019 “

Adapun maksud dari penulisan tesis ini yaitu untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Magister pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta. Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala rendah hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Orang Tua Penulis atas seluruh cinta dan kasih sayangnya, serta doa yang tak henti mengalir dalam sholatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta sekaligus Ketua Penguji. Terima kasih atas Waktu dan arahan, kebijakan, dukungan, dan masukan menyediakan waktu selama penulisan Tesis ini;
2. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku kepala program studi Magister Hukum, Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Terima kasih atas Kesabaran, Waktu, arahan, kebijakan, dukungan, dan masukan selama penulisan Tesis ini;

3. Bapak Dr. Suherman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sangat baik dan maksimal mencurahkan saran – saran ilmu hukumnya yang sangat bermanfaat selama proses penulisan tesis di Fakultas Hukum, program studi Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta;
4. Bapak Prof. Dr. Arrisman, S.H., M.H. selaku penguji 1, Terima kasih atas Kesabaran, Waktu, arahan, kebijakan, dukungan, dan masukan selama penulisan Tesis ini;
5. Para Dosen di Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selama ini telah bekerja keras dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kepada penulis untuk bekal di masa depan nanti;
6. Kedua orang tua saya atas seluruh cinta dan kasih sayangnya, serta doa yang tak henti mengalir dalam sholatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan doa, motivasi dan selalu mendukung saya;
8. Kepada seluruh rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut ilmu untuk mendapatkan Gelar Magister Hukum pada UPN Veteran Jakarta;
9. Para pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis

Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Inayah-Nya kepada kita semua. Akhirkata penulis berharap kiranya tugas akhir ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jakarta, 05 Januari 2022
Penulis



Muammar Adil Daffa
NIM. 1910622056

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	9
1.6 Metode Penelitian	16
1.7 Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAU MASYARAKAT YANG MENYIMPAN DANA DALAM BADAN HUKUM KOPERASI ILEGAL	
2.1 Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Yang Melakukan Penghimpunan Dana Dalam Badan Hukum.....	21
2.2 Syarat dan Prosedur Koperasi Dalam Menjalankan Penghimpunan Dana Masyarakat	25
2.3 Upaya Hukum Pailit Yang Dapat Ditempuh Oleh Masyarakat Yang Melakukan Penghimpunan Dana Di Badan Hukum Koperasi Ilegal....	39
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	48
3.2 Tipe Penelitian	48
3.3 Sumber Data	49
3.4 Metode Pengumpulan Data	50
3.5 Metode Analisis Data	50
3.6 Jadwal Penelitian	51
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENYIMPAN DANA DALAM BADAN HUKUM KOPERASI ILEGAL DI INDONESIA DAN RASIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 K/PDT.SUS-PAILIT/2019	
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menyimpan Dana Dalam Badan Hukum Koperasi Ilegal Melalui Sita Umum Pailit	53

4.2 Analisis Rasio Decidendi Hakim Mahkamah Agung RI Dalam Memutuskan Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 3 K/Pdt.Sus-Pailit/2019	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	105
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	